

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, (Bandung: Alumni, 2011)
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Bandung: Keni, 2011)
- Mertokusumo, Sudikno. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Intenasional*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makkarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia, 2010)

Jurnal/Artikel/Hasil Penelitian

- BGI. *Laporan Kinerja Badan Geologi 2019*. 2019.
- BPHN Kemenkumham. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016*. 2016, pp. 1–245, https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_perizinan.pdf.
- Deffains, Bruno, and Giuseppe Dari-Mattiacci. “Uncertainty of Law and the Legal Process.” *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, vol. 163, no. 4, 2007, p. 627, doi:10.1628/093245607783242990.
- Ika, Syahrir. “Kebijakan Hilirisasi Mineral : Policy Reform Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara.” *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 42–67, doi:10.31685/kek.v1i1.259.
- Intip Hutan. *Kebijakan - 2003 - Larangan Ekspor Kayu Bulat*. no. april, 2003, pp. 7–10, http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2003/04/Larangan_april_2003.pdf.
- Kambono, Herman, and Elyzabet Indrawati Marpaung. “Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Maranatha*, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 137–45, doi:10.28932/jam.v12i1.2282.
- Kementerian Perindustrian Perdagangan Republik Indonesia. “Analisis Biaya Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri Studi Kasus Nikel Dan Tembaga.” *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, 2012, pp. 107–10, [http://rocana.kemenperin.go.id/phocadownload/Kajian/Buku Analisis Biaya-Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba.pdf](http://rocana.kemenperin.go.id/phocadownload/Kajian/Buku%20Analisis%20Biaya-Manfaat%20Pelarangan%20Ekspor%20Bahan%20Mentah%20Minerba.pdf).
- MacNeil, Iain. “Uncertainty in Commercial Law.” *Edinburgh Law Review*, vol. 13, no. 1, 2009, doi:10.3366/e1364980908000966.
- Muhammad Azhar. “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam.” *Relevansi*

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, vol. 8, no. 5, 2015, pp. 274–87.

Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. no. 1, 2015, pp. 15–35.

Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development.” *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 9, no. 1, 2018, p. 36, doi:10.26555/novelty.v9i1.a9224.

Rudeno, V. “The Mining Valuation Handbook.” *Sereal Untuk*, vol. 0, no. 0, 2012.

Sarjana, I. Made. “Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha.” *RechtIdee Issue*, vol. 8, no. 2, 2015, pp. 1–22.

Suseno, Triswan. “Analisis Dampak Sektor Pertambangan Mineral Logam Terhadap Produk Domestik Bruto.” *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, vol. 15, no. 2, 2019, pp. 133–44, doi:10.30556/jtmb.vol15.no2.2019.688.

Internet

Badan Pusat Statistik (BPS). “Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)” diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pada jam 09.25

Meidy Katrin Lengkey, “APNI: Ada Ketidakadilan Terhadap Pengusaha Nikel Lokal”, wawancara oleh Erwin Surya Brata, Jakarta, CNBC Indonesia, 26 Agustus 2019.

Kawan Hukum, “Implikasi Kebijakan Larangan Ekspor Nikel di Indonesia oleh ALSA LC UNSRI dan ALSA Indonesia”, diakses melalui <https://kawanhukum.id/implikasi-kebijakan-larangan-ekspor-nikel-indonesia-terhadap-investasi-dan-percepatan-kendaraan-bermotor-berbasis-baterai-di-indonesia-oleh-alsa-lc-unsri-dan-alsa-indonesia/> pada 28 Juli 2021

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, “Di Balik Kebijakan Relaksasi Ekspor dan Hilirisasi Mineral Logam”, diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-126.pdf> pada 20 Juli 2021.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel”, diakses melalui http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-221.pdf pada 18 Juli 2021.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, “Catatan Akhir Tahun 2019 Sektor Energi dan Pertambangan”, diakses melalui <https://pushep.or.id/catatan-akhir-tahun-2019-sektor-energi-dan-pertambangan/> pada 1 Agustus 2021.

Siaran Pers Kementerian ESDM, “Pembangunan Smelter Capai 27 buah, Smelter Nikel Terbanyak”, diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pembangunan-smelter-capai-27-buah-smelter-nikel-terbanyak> pada 18 Juli 2021.

Siaran Pers Kementerian ESDM, “Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi”, diakses melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi> pada 27 Juli 2021.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (WTO)

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Piagam *Charter of Economic Right and Duties of States* (CERDS)

General Agreement on Tariffs and Trade 1994